

MINYAK DALAM DIPLOMASI DAN POLITIK GLOBAL

Sukawarsini Djelantik

sukedj@home.unpar.ac.id

Abstrak

Kebutuhan masyarakat internasional terhadap pasokan minyak dunia semakin meningkat terutama di negara-negara industri dan industri baru. Kelangkaan minyak diikuti semakin meningkatnya harga minyak dunia yang menyebabkan permintaan yang semakin tinggi terhadap sumber daya alam ini. Distribusi dan kepemilikan yang tidak merata menyebabkan minyak menjadi salah satu sumber konflik global. Sebagai tulang punggung perekonomian dunia, keberadaan minyak secara signifikan mempengaruhi hubungan antar negara. Minyak juga menjadi instrumen diplomasi yang semakin penting sejak diketemukannya sumber daya alam ini di Timur Tengah pada awal abad ke 20. Konflik kepentingan antar negara semakin tak terhindarkan mengingat mayoritas perusahaan-perusahaan minyak dunia dimiliki dan dikelola oleh negara. Tulisan ini membahas peran minyak dalam perekonomian global, dengan memfokuskan pada pembahasan konflik-konflik kepentingan antara negara dengan bisnis.

Kata-kata kunci: *minyak, politik global, ekonomi global, konflik antar negara.*

Pengantar

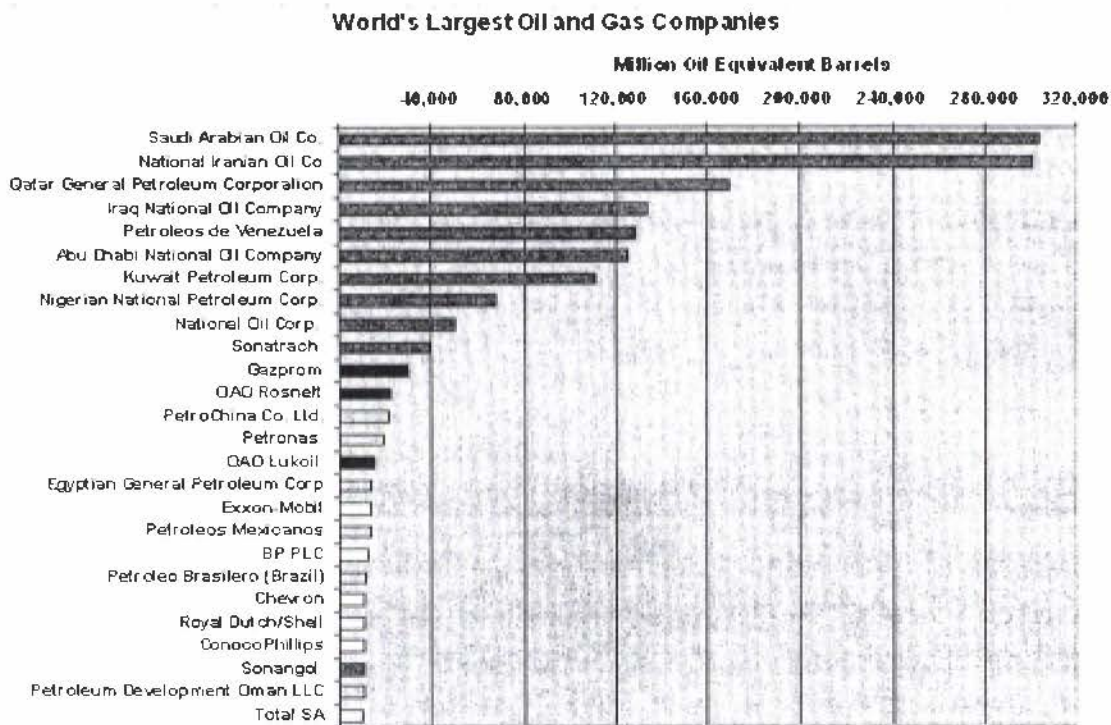
Industri minyak (dan gas) merupakan industri vital semakin penting dalam perekonomian dunia yang terintegrasi, sebenarnya merupakan industri yang paling tidak terglobalisasi. Beberapa alasan adalah, *pertama*, meskipun sudah diprivatisasi dan diregulasi sejak 20 tahun terakhir, sampai saat ini tetap dikuasai oleh negara atau dibawah pengaruh pemerintah. *Kedua*, minyak seringkali dipakai sebagai instrumen politik kekuasaan, baik domestik maupun internasional, selain merupakan faktor pemicu konflik internasional.

Hanya negara-negara demokratis dan bersih yang dapat mengurangi kerusakan akibat konflik. *Ketiga*, karena pertimbangan ekonomi dan politik, masalah-masalah mendasar terkait minyak masih tetap dipertahankan. Konflik politik dan ekonomi semakin memburuk seiring semakin langkanya persediaan minyak dunia. *Keempat*, hanya satu cara jalan keluar, yaitu agar masing-masing negara mengurangi ketergantungan terhadap minyak. Akan tetapi, justru upaya mengurangi konsumsi minyak merupakan tantangan yang sesungguhnya. Dengan alasan diatas, tulisan ini meninjau kaitan yang erat antara minyak dengan kepentingan bisnis dan politik. Pembahasan termasuk kepemilikan negara atas perusahaan-perusahaan minyak dunia yang menjadi penyebab konflik di berbagai belahan dunia. Penulis meyakini bahwa konflik dan perang yang terkait minyak dapat direduksi jika kepentingan antara bisnis minyak dengan politik dipisahkan.

Minyak: Antara kepentingan Politik dan Bisnis

Sebelum membahas mengenai konflik kepentingan yang disebabkan minyak, berikut ini adalah daftar nama perusahaan-perusahaan minyak dan gas terbesar di dunia beserta produksinya dalam hitungan persejuta barel.

Gambar 1. Perusahaan-perusahaan Minyak dan Gas Dunia .



Sumber: Petrostrategies, lihat di:
http://www.petrostrategies.org/Links/Worlds_Largest_Oil_and_Gas_Companies_Sites.htm

Gambar diatas menunjukkan 26 perusahaan minyak yang semuanya merupakan milik pemerintah dan telah mengalami nasionalisasi. Berikut ini adalah gambaran singkat sepuluh (10) besar perusahaan minyak dunia.

1. *Saudi Aramco*, merupakan perusahaan minyak milik pemerintah Arab Saudi. Penghasil dan pemilik cadangan minyak mentah terbesar (25%) dunia. Upaya menasionalisasi perusahaan minyak ini telah dimulai sejak tahun 1950, ketika Raja Abdul Aziz Ibnu Saud, mengancam untuk menasionalisasi fasilitas-fasilitas minyak pemerintah dengan memaksa *Aramco* menyetujui pembagian keuntungan 50/50. Pada tahun 1973, terkait dukungan AS terhadap Israel dalam Perang Yom Kippur, pemerintah Saudi Arabia memperoleh 25% saham *Aramco*, yang meningkat menjadi sebesar 60% pada tahun 1974. Sejak tahun 1980, saham *Aramco* dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah Arab Saudi.¹¹⁸
2. *National Iranian Oil Company* (NIOC), perusahaan minyak yang berdiri tahun 1951 dibawah Kementerian Perminyakan Iran. NIOC dinasionalisasi dari perusahaan *Anglo-Iranian Oil Company* pada masa pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Mossadegh. Jatuhnya Mossadegh menyebabkan perusahaan menjadi konsorsium dari beberapa perusahaan minyak dunia, dengan pembagian 50/50. Kemenangan Revolusi Iran kemudian membatalkan kesepakatan antara Iran dengan Konsorsium yang ditandatangani tahun 1954 serta semua kesepakatan sebelumnya. Kondisi ini diikuti pengusiran terhadap para pejabat dan pekerja minyak asing dari Iran oleh Pemerintah Republik Islam Iran, digantikan oleh para pekerja lokal.¹¹⁹
3. *Iraq National Oil Company* (INOC), berdiri pada tahun 1966 dibawah penguasaan Pemerintah Irak. *INOC* menolak kerjasama atau memberikan konsesi pengelolaan kepada perusahaan-perusahaan asing. Proses nasionalisasi selesai pada tahun 1972.
4. *Qatar General Petroleum Corporation* (QGPC), milik pemerintah Qatar. Berdiri pada tahun 1974 dengan tujuan untuk menguasai seluruhnya sumber-sumber minyak dan gas.¹²⁰

¹¹⁸ Saudi Aramco, lihat di : <http://www.saudiaramco.com/irj/portal/anonymous?favlnk=%2FSaudiAramcoPublic%2Fdocs%2FA1+A+Glance%2FOur+Story&ln=en>, diakses tanggal 29 Januari 2010.

¹¹⁹ NIOC, lihat di: <http://www.hoovers.com/company/National Iranian Oil Company/hhxjhi-1.html>, diakses tanggal 29 Januari 2010.

¹²⁰ Qatar General Petroleum Company: <http://www.fundinguniverse.com/company-histories/QATAR-GENERAL-PETROLEUM-CORPORATION-Company-History.html>, diakses tanggal 29 Januari 2010.

5. *Petroleos de Venezuela (PDVSA)*, penghasil minyak terbesar kelima dunia, dengan kepemilikan 100% saham oleh Kementrian Rakyat untuk Minyak dan Energi Venezuela. Nasionalisasi perusahaan telah selesai per tanggal 1 Januari 1976.¹²¹
6. *Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC)* milik pemerintah Uni Emirat Arab (UEA).¹²²
7. *Kuwait Petroleum Corporation (KPC)*, milik pemerintah Kuwait, yang berdiri pada tanggal 27 Januari 1980.¹²³
8. *Nigerian National Oil Corporation (NNOC)*, berdiri tanggal 1 April 1977, sebagai gabungan atas Perusahaan minyak dengan Kementerian Pertambangan dan Energi Nigeria. *NNOC* juga merupakan pengelola kerjasama pemerintah federal Nigeria dengan beberapa perusahaan minyak multinasional seperti *Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, Agip, TotalFinaElf, Chevron dan Texaco*.¹²⁴
9. *National Oil Corporation (NOC)*, milik pemerintah Libya, dan pemilik cadangan minyak terbesar di Afrika setelah Nigeria dan Aljazair. Nasionalisasi terjadi pada tahun 1970 ketika Libya memberlakukan sistem pemerintahan sosialis yang diikuti nasionalisasi aset-aset negara.¹²⁵
10. *Sonatrach, (Société Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la Transformation, et la Commercialisation des Hydrocarbures s.p.a.)* milik pemerintah Aljazair.¹²⁶

Oleh karena perusahaan-perusahaan minyak dan gas terbesar dunia dimiliki oleh pemerintah, maka kepentingan bisnis dan politik tidak dapat dipisahkan. Sulitnya pemisahan antara kepentingan politik dan bisnis tampak ketika AS menginvasi Irak pada tahun 2003, yang tujuannya antara lain untuk menjamin keamanan pasokan minyak AS. Sebagai contoh, Richard (Dick) Bruce Cheney, mantan Wakil Presiden AS pada era George Bush, sebelumnya adalah CEO perusahaan *Halliburton*¹²⁷, yaitu perusahaan penyedia jasa bagi

¹²¹ PDVSA, lihat di : <http://www.pdvs.com/index.php?tpl=interface.en/design/home.tpl.html>, diakses tanggal 29 Januari 2010.

¹²² ADNOC, lihat di: <http://bharatbookbureau.blog.co.in/2010/01/20/abu-dhabi-national-oil-company-oil-gas-company-report-profile-covers-companys-exploration-blocksoil-and-gas-fields-refinery-lng-pipeline-storage-assets-business-strategy-value-chain-swo/>, diakses tanggal 29 Januari 2010.

¹²³ Kuwait Petroleum Corporation, lihat di : <http://www.kpc.com.kw/default.aspx>, diakses tanggal 29 Januari 2010.

¹²⁴ Nigerian National Oil Corporation, lihat di: www.nnocgroup.com/, diakses tanggal 29 Januari 2010.

¹²⁵ Libyan Oil Corporation, lihat di: <http://www.nockenya.co.ke/>, diakses tanggal 29 Januari 2010.

¹²⁶ Sonatrach, lihat di: <http://www.sonatrach-dz.com/>, diakses tanggal 29 Januari 2010.

¹²⁷ Lihat: www.answers.com/topic/dick-cheney, diakses tanggal 28 Januari 2009.

perusahaan minyak¹²⁸ yang terlibat dalam mempersiapkan perang. Pernyataan ini dibuktikan melalui peran *Halliburton* dalam aktivitas-aktivitas pasca Perang Irak. Dukungan selanjutnya dari perusahaan-perusahaan minyak terhadap kebijakan-kebijakan George Bush semakin menegaskan kaitan antara politik dan minyak.

Contoh lainnya terjadi di Perancis, ketika *Total* dan *Elf* (bergabung menjadi *TotalFinaElf*)¹²⁹ telah diprivatisasi pada tahun 2000. Skandal korupsi besar-besaran pada tahun 1990an yang melibatkan dewan direksi dan sejumlah politikus, ditambah dengan keterlibatan perusahaan ini di dalam politik pasca kolonial yang kejam di beberapa negara Afrika –mengungkapkan kaitan yang erat keterlibatan perusahaan-perusahaan minyak dengan pemerintah Perancis.¹³⁰

Meskipun dua contoh diatas menunjukkan konflik-konflik kepentingan yang disebabkan kepemilikan minyak oleh pemerintah, tetapi dalam kasus Norwegia, terjadi kebalikannya. Belum pernah terjadi kritikan mengenai aktivitas *Statoil*, meskipun duapertiga sahamnya dimiliki pemerintah. Dalam hal ini terlihat bagaimana sebuah negara demokrasi dengan pemerintahan yang bersih lebih berperan daripada kepemilikan formal.¹³¹

Minyak dan Politik Kekuasaan

Kaitan antara minyak, politik, dan kekuasaan dapat ditinjau dari kasus Arab Saudi dan Timur Tengah. Arab Saudi merupakan sekutu lama AS, akan tetapi sejak tragedi serangan teroris terhadap World Trade Center di New York pada tanggal 11 September 2001, kelangsungan aliansi dengan AS sempat dipertanyakan, meskipun tidak sampai putus secara resmi. Sejak konflik di Palestina kembali memanas diikuti meningkatnya ketegangan dengan AS dan Iran, kritik terhadap Irak semakin meningkat. Mengingat posisi Irak sebagai negara pemilik cadangan minyak dunia terbesar keempat, maka untuk menghadapi ketegangan ini, AS memerlukan dukungan dari keberadaan sekutu yang kuat di kawasan.¹³²

¹²⁸ Halliburton, lihat: www.halliburton.com, diakses tanggal 28 Januari 2009.

¹²⁹ Total Fina Elf, lihat di <http://www.fundinguniverse.com/company-histories/Total-Fina-Elf-SA-Company-History.html>, diakses tanggal 15 Februari 2010.

¹³⁰ Peter J. Schraeder, Cold War to Cold Peace: Explaining U.S.-French Competition in Francophone Africa, *Political Science Quarterly*, The Academy of Political Science, Vol. 115, No. 3 (Autumn, 2000), hal. 395-419

¹³¹ Reidar Visser, Is Statoil Getting It Wrong in Iraq?, <http://www.historiae.org/statoil.asp>, diakses tanggal 18 Maret 2010.

¹³² Ariel Cohen, 2006, *Reducing U.S. Dependence on Middle Eastern Oil*, The Heritage Foundation, lihat di: <http://www.heritage.org/Research/Reports/2006/04/Reducing-US-Dependence-on-Middle-Eastern-Oil>, diakses tanggal 18 Maret 2010.

Dalam kasus Venezuela. Jika Hugo Chavez tidak mempunyai akses dari PVDSA dan memiliki penghasilan negara yang tinggi dari hasil minyak, maka dukungan dari negara-negara tetangganya menghadapi kebijakan anti-Amerika dan anti-kapitalis tentu tidak dengan mudah diperoleh.¹³³ Dalam menghadapi AS, Chavez menyatakan bahwa “minyak merupakan senjata geopolitik dalam menghadapi AS”. Peran penting minyak dalam hubungan AS-Venezuela, misalnya, tidak dapat diremehkan. Selain sebagai negara penghasil minyak terbesar kelima dunia, Venezuela juga merupakan negara pengekspor minyak keempat ke AS setelah Canada, Mexico, dan Arab Saudi. Data tahun 2004 menunjukkan *Petroleos de Venezuela* (PDVSA) mengekspor sejumlah 11,8% (atau setara 1,52 juta barel minyak per-hari) ke AS.¹³⁴

Perekonomian dunia yang meningkat pesat pada beberapa tahun terakhir, meningkatkan permintaan terhadap sumber daya alam khususnya minyak. Dalam kasus Cina, perekonomian yang meningkat rata-rata mencapai 9% pertahun dalam dua dekade terakhir, memerlukan pasokan energi yang besar untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan. Meskipun Cina memakai batu bara untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan energinya, tetapi negara berpenduduk terbesar di dunia ini juga merupakan konsumen minyak terbesar dunia kedua setelah AS. Cina sebelumnya merupakan negara pengekspor minyak terbesar di Asia, tetapi sejak tahun 1993 telah menjadi negara pengimpor minyak. Kebutuhan Cina terhadap minyak meningkat sebanyak 10% setiap tahun, selain permintaan yang tinggi terhadap sumber-sumber energi lain. *The International Energy Agency* memproyeksikan Cina akan perlu mengimpor minyak sebesar 13,1 juta barel per-hari pada tahun 2030. Bandingkan dengan data tahun 2006 yang menunjukkan Cina mengimpor 3,5 juta barel minyak per hari. Dewasa ini Cina mengimpor kira-kira setengah dari pasokan minyaknya dari Timur Tengah, dan angka itu akan terus meningkat pada dekade mendatang. Maka meningkatnya permintaan pasokan energi memaksa Cina untuk mencari pasar baru, khususnya dari Afrika.¹³⁵

Afrika memiliki hanya sebesar 9% dari cadangan minyak dunia, sangat kecil dibandingkan dengan cadangan minyak Timur Tengah yang besarnya

¹³³ Stephen Lendman, “Wall Street Journal Claims Chavez Oil Policy Aims to Weaken US”, Centre for Research on Globalization, 4 Mei 2007, lihat di www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=5561, diakses tanggal 22 Februari 2010.

¹³⁴ Nikolas Kozloff, *Council for Hemispheric Analysis (COHA)*, Venezuela’s Chavez: “Oil is a Geopolitical Weapon”, lihat di : *Venezuelanalysis*, Venezuela News, View and Analysis, 29 Maret 2005. Lihat di : www.venezuelanalysis.com, diakses tanggal 22 Februari 2010.

¹³⁵ Stephanie Hanson, “China, Africa, and Oil”, Council on Foreign Relations, Lihat : www.cfr.org, diakses tanggal 22 Februari 2010.

62%. Tetapi, para analis percaya bahwa Afrika masih menyimpan cadangan yang masih belum dieksplorasi dan dieksploitasi. Oleh karena itu, Cina bermaksud untuk meningkatkan impor minyak dari Kawasan Afrika. Saat ini saja, sebanyak sepertiga dari pasokan minyak Cina didatangkan dari Afrika, atau sebesar 9% dari total ekspor benua Afrika pada tahun 2006. Negara-negara pemasok minyak untuk Cina terbesar adalah Angola, Republik Kongo, Guinea Ekuator, Sudan, Chad, Nigeria, Aljazair, dan Gabon.¹³⁶

Berdasarkan kondisi diatas, tidak mengherankan jika Cina memakai minyak sebagai salah satu instrumen diplomasi secara terang-terangan di Afrika. *Amnesty International* melaporkan mengenai ekspor senjata yang tidak terkontrol dan terus mengalir dari Cina untuk mendukung konflik yang berujung pada pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di Sudan. Pemerintah Cina juga menentang menguatnya embargo persenjataan ke Sudan oleh Dewan Keamanan PBB. Kepentingan Cina yang paling kasat mata adalah mengamankan pasokan minyaknya. Bukti bahwa pemerintah Cina sangat memperhatikan kelanjutan pasokan minyak ditunjukkan dengan kunjungan Presiden China Hu Jintao, ke negara-negara produsen minyak di Afrika.¹³⁷

Minyak sekarang merubah posisi keseimbangan kekuatan dan menjadikan negara-negara besar lebih berkuasa. Minyak menjadi topik yang hangat, karena struktur perekonomian dunia yang diperkuat dengan permintaan yang tinggi. Struktur pertama yaitu sumber minyak yang semakin langka berhadapan dengan permintaan yang semakin tinggi. Pada tahun 2006, harga minyak telah mencapai sekitar USD 70 per-barel.¹³⁸ Meskipun diikuti penurunan harga sesudahnya, data terakhir harga minyak dunia (bulan Januari 2010) masih seputar USD 70 per-barel. Meskipun sudah mengalami beberapa kali penurunan, tetapi harga setinggi itu belum pernah terbayangkan oleh anggota Organisasi Pengekspor Minyak Dunia (OPEC) pada era tahun 1970an ketika terjadi lonjakan harga minyak dunia (*oil boom*).

Struktur kedua adalah aset-aset minyak sifatnya tetap dan sulit dipindahkan, karena merupakan aset tetap yang menjadi materi rampasan atau nasionalisasi oleh pemerintah. Pemerintah mudah merebut aset berupa perusahaan minyak, terutama dari negara-negara kolonial yang memiliki jajahan di negara-negara berkembang atau negara yang pernah menjadi negara adikuasa (seperti Rusia). Pemerintahan yang populis seperti Argentina

¹³⁶ Stephanie Hanson, op.cit.

¹³⁷ Stephanie Hanson. Op.cit.

¹³⁸ US Energy Information Administration, lihat di : http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/PET_PRI_WCO_K_W.htm, diakses tanggal 2 Februari 2010.

dibawah Hugo Chavez juga senang memanipulasi penduduk yang miskin dengan isu-isu nasionalisasi dan rasa kebangsaan.

Bisnis minyak tidak mengenal penarikan modal keluar negeri. Dari perspektif pemerintah negara pemilik sumber daya, nasionalisasi merupakan alat yang populer untuk mengusir perusahaan-perusahaan asing dengan alasan perusahaan minyak multinasional merupakan alat penjajahan baru. Jika nasionalisasi dilakukan terhadap perusahaan piranti lunak luar negeri, hanya menimbulkan masalah pelarian sumber daya manusia (*brain drain*) atau pelarian modal (*capital flight*), berupa pengalihan modal ke bank-bank asing. Minyak juga menuntut investasi modal besar yang pengembaliannya memerlukan jangka waktu yang sangat panjang. Mengenai hal ini, Shah M. Tarzi menulis sbb:

(pada mulanya)

"ketidakpastian mengenai keberhasilan proyek investasi asing, kesepakatan harga, dan keinginan negara penerima untuk menarik investasi asing yang menyebabkan ketidakseimbangan kekuatan pasar yang lebih menguntungkan perusahaan-perusahaan multinasional..."

(kemudian)

"setelah ketidakpastian berkurang dan proyek investasi berhasil, posisi tawar perusahaan multinasional mulai berkurang. Jumlah penanaman modal di perusahaan-perusahaan besar "jatuh", sehingga menjadi sandera dan sumber kekuatan negara pemilik sumber minyak yang menuntut yurisdiksi atas aset-aset asing yang berharga...Konsekwensinya, ketika keuntungan posisi tawar mulai beralih ke negara pemilik sumber minyak, kesepakatan awal yang menguntungkan perusahaan-perusahaan multinasional kemudian dinegosiasikan ulang..."

(selanjutnya:)

Dalam mengelola perusahaan berteknologi tinggi, kemungkinan kadaluwarsa sangat rendah. Perusahaan-perusahaan multinasional dalam bidang sumber data alam, merupakan pihak yang paling rentan...(...).¹³⁹

¹³⁹ Shah M Tarzi , 1991, *The Third World Governments and Multinational Corporations: Dynamics of Host's Bargaining Power*, *International Relations*. Vol. X, no.3, May 1991.

Rusia dijadikan studi kasus untuk penelitian oleh Tarzi. Saham *Gazprom* sebesar 51% dimiliki oleh pemerintah Rusia, atau meningkat dari 38% pada tahun 2005. Pada tanggal 21 Desember 2006, *Gazprom* telah merebut saham secara sepihak dari perusahaan-perusahaan seperti *Shell* dan *British Petroleum* (BP) dalam proyek ekstraksi minyak di Kepulauan Sakhalin (dalam Proyek Sakhalin II), sehingga memicu konflik internasional.¹⁴⁰ Seandainya pemerintah Rusia tidak atau tidak lagi memiliki saham resmi di *Gazprom*, para pemilik perusahaan minyak besar tetap memiliki pengaruh yang kuat terhadap pemerintah Rusia. Meski pemerintah Rusia hanya menguasai 51% saham, tetapi, Ketua Dewan Direksi *Gazprom*, Dmitry Medvedev juga merupakan Wakil Perdana Menteri yang menjadi salah seorang calon pengganti Vladimir Putin.¹⁴¹

Mengingat *Gazprom* dipakai sebagai alat pendongkrak kekuatan politik Putin di negara Federasi Rusia, maka tidak diragukan lagi bahwa politik dengan mudah dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan minyak. *Gazprom* menjadi salah satu alat politik luar negeri untuk menekan negara-negara tetangganya yang bermasalah dan negara-negara satelit bekas Uni Sovyet. *Gazprom* menjadi salah satu senjata penting dalam menghadapi persaingan kekuasaan terkait rencana menggantikan posisi Vladimir Putin. Penguasaan negara atas *Gazprom* (atau penguasaan *Gazprom* atas negara?) semakin meningkatkan otoritarianisme negara. Dalam 18 bulan terakhir, bank, produser mobil, agen perumahan, retailer, seperti *IKEA* telah berinvestasi di pasar Rusia. Pemerintah tidak memperhatikan mereka bahkan mempersilahkan untuk pindah. Hal itu membuat negara merasa lebih kuat sehingga dapat meningkatkan popularitas Putin. Sementara itu pengaruh politik *Gazprom* meningkat padahal tengah menghadapi peristiwa *Yukos*¹⁴² dan masalah Sakhalin II.¹⁴³

Perang Minyak “Lama” dan “Baru

“Perang lama”, merupakan istilah yang dipakai untuk perang yang sifatnya geopolitis, melibatkan persaingan antar negara, khususnya negara-

¹⁴⁰ John Donovan, Rift Develop Among Investors in Russian Gas Venture, lihat di: <http://royaldutchshellplc.com/2008/05/>, diakses tanggal 18 Maret 2010.

¹⁴¹ Tarzi, op.cit.

¹⁴² Lee S. Wolosky, Putin's Plutocrat Problem, 79 *Foreign Affairs* 18 (2000)., lihat di : <http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/fora79&div=28&id=&page=>, diakses tanggal 2 Februari 2010.

¹⁴³ Michael J. Bradshaw, 1998, Going Global: The political economy of oil and gas development offshore of Sakhalin. *Cambridge Review of International Affairs*, Vol. 12, Issue 1, Summer 1998, hal. 147-176.

negara besar. Perang lama atau konvensional juga terkait upaya menguasai wilayah dan membangun aliansi yang kuat dengan aktor-aktor domestik, membangun dan mempengaruhi pemerintahan yang kuat dan otoriter, selain mendapatkan kontrak dan konsesi. Aktor-aktor yang terlibat dalam perang lama berimplikasi pada kekuasaan negara dengan tujuan militer untuk menguasai wilayah. Lokasi yang menentukan adalah di medan perang yang melibatkan angkatan bersenjata. Contohnya adalah perang dunia pertama dan kedua, yang menuntut negara-negara pelaku memobilisasikan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan negara dan pemerintahan yang baru di wilayah yang dikuasai.¹⁴⁴

“Perang baru” terjadi dalam konteks negara yang gagal, dengan batas-batas wilayah yang tidak relevan. Perang terjadi pada jaringan negara-negara dan bukan negara. “Medan perang” yang sesungguhnya tidak ada, sementara kekerasan biasanya ditujukan kepada simbol-simbol pemerintahan. Karakteristik penting lainnya adalah tipe baru politik ekonomi yang melibatkan kombinasi ekstremis politik dan kriminal. Contohnya seperti di Somalia, Afghanistan, Sudan, dan Irak. Dalam perang baru, tetap harus dilihat apakah negara yang dikuasai dapat mempertahankan dukungan masyarakat luas selama waktu yang diperlukan untuk membangun pemerintahan yang baru, dan apakah negara yang gagal dapat dibangun kembali oleh kekuatan eksternal dan bukan oleh kekuatan domestik.¹⁴⁵

Argumen mengenai pecahnya Perang Irak pada umumnya diposisikan pada kerangka kekuatan militer berdasarkan konsep “perang lama” pada abad ke 20, seperti pada Perang Dunia I, II, dan Perang Dingin. Pada perang-perang ini, minyak dianggap sebagai komoditas strategis, sehingga keamanan pasokan minyak hanya didapat melalui penguasaan militer langsung terhadap kawasan atau menanamkan pengaruh terhadap penguasa yang otoritarian dari negara-negara pengeksport minyak. “Perang minyak lama” dan “baru” memiliki sifat berbeda.

Meskipun minyak masih menjadi komoditas strategis vital bagi negara-negara industri Barat, dalam perang minyak “baru”, keterlibatan negara untuk mengamankan pasokan telah jauh berkurang. Perang ini biasanya dialami negara-negara yang lemah dan kadang-kadang negara gagal (*failed states*) yang mengalami kejatuhan pada sektor industri non-migas, kemunduran legitimasi politik, dan menurunnya monopoli kelompok-kelompok yang terorganisir. Pada “perang baru”, harga sewa minyak yang jumlahnya luar

¹⁴⁴ Mary Kaldor, Terry Lynn Karl, dan Yahia Said, *Oil Wars*, Pluto Press, London, hal. 5.

¹⁴⁵ Kaldor, dkk. op.cit, hal. 5.

biasa besar lebih banyak dipakai untuk membiayai konflik dan memelihara perekonomian politik negara yang predator. Contoh terburuk terjadi di Chechnya atau Irak, dimana aktor-aktor mendapatkan sumber pemasukan utama dari berlangsungnya konflik. Medan perang juga menjadi sumber terorisme.¹⁴⁶ Pada kasus yang paling baik, sewa pajak atas perusahaan minyak berhasil mempertahankan pemerintahan yang sentralistik, dan harga sewa cenderung tinggi. Uang sewa dipergunakan untuk aksi-aksi kekerasan dan melemahkan negara, yang berisiko menyebabkan negara yang gagal, sehingga meningkatkan ancaman terhadap terjadinya “Perang minyak baru”.

Apapun motivasi, latar belakang agama, etnis, atau politik, minyak berpotensi sebagai penyebab konflik. Sebagai faktor penyebab konflik, minyak melibatkan kepentingan ekonomi dari pendapatan minyak. Dalam sejarah, kepentingan ekonomi selalu menjadi kasus, dengan perubahan pada abad ke 20 pada keterlibatan aktor dan sifat-sifat penyewaan lokasi penambangan minyak. Kompetisi geopolitis bertambah melalui persaingan diantara berbagai aktor domestik yang secara efektif memperpanjang konflik. Bentuk-bentuk kekerasan ditujukan kepada aktor-aktor non-negara baik asing maupun lokal, untuk mendapatkan akses langsung atas konsesi minyak dengan cara legal maupun ilegal. Maka pencarian sumber-sumber minyak untuk diolah di negara-negara pengeksport minyak perlahan-lahan disaring masyarakat melalui kompetisi tingkat internasional dan domestik. Ini menimbulkan persaingan diantara aktor-aktor bukan negara pada tingkat lokal. Ketika Jika terjadi di negara-negara gagal, pendapatan dipakai untuk membeli senjata dan uang dari pajak atau sewa dipergunakan untuk aksi-aksi kekerasan pada setiap tingkatan. Hal ini menyulitkan untuk menetapkan kembali otoritas melalui pengawasan wilayah. Kaitan antara negara yang mengejar pajak dari pemberian konsesi dan kekerasan dijelaskan dalam kerangka “oil rent seeking cycle”, sebuah perkembangan yang memiliki kemampuan memisahkan apa yang tampak bagaikan sebuah negara minyak yang kaya.¹⁴⁷

Minyak dan Konflik; Tinjauan Geostrategis

Kaitan antara perang dan minyak dapat dijelaskan dari segi geo-strategis, selain ketamakan pihak-pihak yang berkonflik. Wilayah yang dikuasai secara militer diikuti pembentukan kembali pemerintahan di negara pengeksport

¹⁴⁶ Anup Shah, 2004, “Crisis in Chechnya”, Global Crisis, lihat di : <http://www.globalissues.org/article/100/crisis-in-chechnya>, diakses tanggal 18 Maret 2010.

¹⁴⁷ Anne Krueger, 1974, “The Political Economy of Rent Seeking Society”, American Economic Review, Vol. 64, June 1974, hal 291-303, lihat di : <http://bbs.cenet.org.cn/uploadimages/2004132356266152.pdf>, diakses tanggal 18 Maret 2010.

minyak yang mengalami konflik, tidak memiliki pengawasan yang lebih besar atas pasokan atau harga minyak, tetapi instabilitas politik dan ekonomi yang lebih besar. Lebih banyak negara besar berupaya menguasai akses terhadap minyak dengan cara kekerasan, membangun benteng disekeliling ladang minyak, atau menempatkan tentara sepanjang pipa jalur minyak. Dengan cara ini, pasokan minyak menjadi lebih tidak aman. Seperti dalam perang Irak, perang minyak baru terancam menjadi “liar” atau menjadi “negara-negara yang gagal”, yang mengancam keamanan global.¹⁴⁸

Minyak juga dapat memitigasi pengaruh konflik. Dengan pengecualian beberapa cadangan minyak lepas pantai, minyak secara alamiah tidak dapat dikembangkan dan dieksploitasi oleh negara yang benar-benar gagal. Semua keuntungan potensial dari sewa minyak akhirnya dipakai untuk kepentingan menjaga agar investasi yang besar dan menengah dari regulasi yang diinginkan untuk mempertahankan produksi minyak tetap berjalan. Risiko kegagalan negara dan hambatan pasokan pada akhirnya menyebabkan insentif bagi aktor-aktor yang sebelumnya berkonspirasi untuk mengamankan kelemahan untuk bekerjasama dalam pembangunan institusi hukum. Tidak ada alasan selain mempertahankan agar sewa tetap dibayar. Kepentingan strategis minyak juga berarti konflik jarang menyisakan pergolakan internasional tingkat tinggi. Konflik atas minyak tetap menjadi pusat perhatian pemerintah, aktor-aktor multinasional dan aktor-aktor masyarakat sipil, selain mengundang intervensi luar.

Argumen diatas dipertegas oleh kasus Irak sebagai metafora untuk menguji berubahnya sifat perang. Hubungan antara perang dan minyak terkait eksploitasi yang menjelaskan alasan khusus negara-negara pengeksport minyak yang menang perang. Selain itu, masalah-masalah sekitar minyak dan perang berubah dari perang lama/konvensional ke perang minyak baru. Risiko perang di negara-negara pengeksport minyak sifatnya lebih besar daripada di negara lain.

Studi Kasus: Irak Sebagai Arena Perang Minyak

Perang Teluk II, yang dimulai dengan penyerbuan tentara AS ke Irak, dan ditandai dengan jatunya patung Saddam Hussein pada tanggal 1 Mei 2003¹⁴⁹, merupakan contoh perang minyak baru. Semua jenis teknologi persenjataan dipergunakan, mulai dari sistem persenjataan berbasis satelit sampai telepon

¹⁴⁸ Mary Kaldor, Terry Lynn Karl, Yahia Said, *Oil Wars*, Pluto Press, London, 2007, hal. 16.

¹⁴⁹ Gulf War II Into Battle, *Time Magazine*, lihat di : <http://www.time.com/time/covers/1101030331>, diakses tanggal 18 Maret 2010.

genggam dan internet. Dalam kondisi seperti ini, ketika sebuah negara otoriter jatuh, negara kehilangan monopoli kekuasaan. Hukum tidak lagi berfungsi, digantikan dengan kekerasan yang diprivatisasi, baik untuk mengejar keuntungan pribadi, menyebarnya kriminalitas dan kekacauan yang ditujukan kepada masyarakat sipil. Ketika komoditas yang berharga seperti minyak juga terlibat, bahaya menjadi lebih besar.

Kaitan antara minyak dan perang memunculkan pertanyaan apakah keberadaan minyak meningkatkan konflik, durasi, dan intensitas perang, atau apakah menyebabkan konflik menjadi lebih sulit diselesaikan. Pertanyaan lebih jauh adalah mengapa kepentingan bisnis minyak menyebabkan perang, dan mengapa minyak dapat memperpanjang atau menyebabkan sulitnya menghentikan perang. Kaldor dan kawan-kawan mengemukakan tiga argumen mengenai sebab-sebab perang yaitu faktor geopolitik, ketamakan, dan "negara minyak".¹⁵⁰ Penjelasan geopolitik pada intinya menggambarkan upaya mengejar kepentingan nasional melalui penguasaan atas minyak baik untuk alasan-alasan ekonomi maupun strategis. Dalam teori Hubungan Internasional, kepentingan ini seperti yang digambarkan oleh Macchiavelli dan Clausewitz.¹⁵¹

Minyak menguasai sektor-sektor industri yang menjadi jantung perekonomian di negara-negara Barat. Kekuatan militer AS terletak pada penguasaan akses sumber-sumber minyak, bahkan tidak dapat bertahan tanpa terjaminnya pasokan. Karena minyak merupakan kepentingan vital negara-negara Barat, maka tidak ada satu negarapun diijinkan untuk mendominasi pasokan minyak dunia. Kalau perlu, kekuatan senjata menjadi penjamin terakhir keamanan pasokan. Negara-negara industri maju (dan negara yang sedang berkembang seperti Cina) menjadi lebih tergantung pada impor minyak dan lebih sering mengalami kekurangan pasokan. Maka minyak tidak saja menjadi isu kebijakan luar negeri, tetapi juga keamanan nasional. Kekuatan minyak dibuktikan dengan fakta bahwa kekuatan militer AS lebih banyak dipakai sebagai alat untuk "jasa mengamankan minyak". Ladang-ladang minyak di luar negeri dan rute-rute pasokan dilindungi oleh militer agar pasokan terjamin.¹⁵²

Analisis geopolitis relevan dengan konsep "perang lama", seperti dalam Perang Dunia I dan II, ketika minyak memegang peran strategis yang

¹⁵⁰ Mary Kaldor, Terry Lynn Karl, Yahia Said, *Oil Wars*, Pluto Press, London, 2007, hal. 16.

¹⁵¹ Jordan Lindell, 2009, "Clausewitz: War, Peace and Politics", *International Relations Essay*, <http://www.e-ir.info/?p=2735>, diakses tanggal 18 Maret 2010.

¹⁵² Michael T. Klare, 2005, *Blood and Oil: The Dangers and Consequences of America's Growing Dependency on Imported Petroleum*, Henry Holt & Co, New York.

mendasar sehingga menjadi “komoditas vital”. Minyak penting sebagai modal dalam kedua perang besar ini, mengingat revolusi persenjataan militer sangat mengandalkan kendaraan darat, tank, pesawat udara dan kapal perang laut. Lord Curzon, setelah Perang Dunia I mengatakan bahwa kemenangan tentara sekutu karena pasokan minyak yang lancar. Pernyataan ini didukung dengan fakta bahwa kunci kemenangan tentara Sekutu adalah hancurnya ladang minyak yang kaya raya di Rumania dan ditolakny akses Jerman terhadap ladang minyak di Baku, Azerbaijan (pada waktu itu menjadi negara produsen terbesar minyak terbesar kedua di dunia).¹⁵³ Sesungguhnya, pada waktu perang modern sampai tahun 1919, minyak terbukti sebagai bahan mentah strategis di masa mendatang. Realitas ini yang diakui oleh semua negara besar. Maka Inggris sebagai negara kolonial penting, memakai konflik untuk menguasai minyak di Timur Tengah sebagai strategi jangka panjang, dan menjadikan Teluk Persia sebagai “danaunya Inggris”.

Pada Perang Dunia I minyak diakui untuk pertama kalinya sebagai komoditas strategis yang penguasaannya penting untuk desain kejayaan negara. Keamanan pasokan tergantung apakah negara dikuasai secara langsung atau tidak langsung (melalui hubungan patron-klien) antara negara kolonial dengan pemerintah otoriter yang bersahabat. Karena minyak berarti kekuasaan, maka konflik dan rivalitas tidak dapat dihindarkan di Eropa; antara Eropa dan AS, antara perusahaan-perusahaan minyak besar, dan antara perusahaan-perusahaan besar dengan pemerintah-pemerintah negara-negara produsen. Ketika sumber minyak besar-besaran ditemukan di Timur Tengah dan Amerika Latin, maka ancaman kekerasan dan konflik terjadi diantara negara pemilik. Di Meksiko terjadi konflik tajam ketika AS mendaratkan tentara pada tahun 1912, tidak lama setelah ditemukan ladang minyak baru. *Standard Oil* mengirimkan senjata dan uang kepada pemerintahan yang baru dibentuk agar AS dapat menggantikan dominasi perusahaan-perusahaan minyak dari Inggris. Konfrontasi sesudahnya atas minyak membawa Meksiko dan AS hampir terlibat beberapa kali peperangan. Sementara itu perusahaan-perusahaan minyak AS dan Inggris terus berperang atas sumber minyak di Meksiko sampai akhir tahun 1938, ketika Presiden Cardena melakukan nasionalisasi atas semua perusahaan-perusahaan minyak. Akibatnya kedua negara memboikot Meksiko selama 40 tahun.¹⁵⁴

¹⁵³ **Dietrich Eichholtz.** *Krieg um Öl: Ein Erdölimperium als deutsches Kriegsziel 1938-1943.* Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2006. Book review by Allison Frank, Harvard University, Global Research 2009, lihat di : <http://35.9.18.4/reviews/showrev.php?id=23080>, diakses tanggal 11 Maret 2010.

¹⁵⁴ Lorenzo Meyer, 1977, *Mexico and the United States in the Oil Controversy, 1917-1942*, diterjemahkan oleh Muriel Vasconcellos, University of Texas Press, Austin.

Pada Perang Dunia II, tidak lama setelah konflik minyak Meksiko mereda, peran minyak bahkan menjadi lebih penting, tidak hanya untuk perang tetapi juga sebagai motivasi untuk berperang. Dikatakan bahwa:

*“orang yang paling berani pun tidak ada artinya tanpa senjata, senjata tidak ada artinya tanpa amunisi yang banyak, dan senjata dan amunisi tidak banyak artinya dalam peperangan yang memerlukan mobilitas tinggi kecuali telah diisi minyak yang cukup agar dapat bergerak bebas”.*¹⁵⁵

Jerman dan Jepang juga tergantung pada impor minyak, dan kekhawatiran pemotongan pasokan minyak mengarahkan aksi-aksi mereka, karena akses terhadap minyak pada akhirnya berarti kemenangan atau kekalahan.¹⁵⁶ Contohnya, ketika Jepang semakin masuk ke pedalaman untuk menguasai China dan negara-negara Asia lainnya, mereka tidak dapat bertahan setelah diberlakukan embargo minyak oleh pemerintahan Presiden Roosevelt dan pembekuan dana untuk membeli bahan bakar oleh AS. Serangan Jepang terhadap Pearl Harbour dimaksudkan untuk melumpuhkan armada-armada AS, yang dipercaya Jepang dapat mempertahankan rute-rute tanker dari Sumatra dan Borneo, karena Jepang menginginkan terjaminnya akses atas minyak dari Hindia Belanda. Akses terhadap minyak juga menjadi motif utama invasi Jerman terhadap Uni Sovyet. Tentara Jerman kehabisan bahan bakar minyak sebelum dapat mencapai Kaukasus, yang menjadi tujuan strategis utama. Sebagai gantinya, tentara Nazi dengan putus asa memakai buruh untuk membuat minyak sintetis. Minyak bahkan mendefinisikan strategi perang Jerman melawan kebutuhan Inggris yang besar terhadap minyak. U-Boat dipakai (meskipun gagal) untuk memotong pasokan minyak yang berlimpah dari AS. Akhirnya, penguasaan AS atas minyak menjadi faktor penentu yang menentukan kemenangan perang.

Minyak dianggap sebagai pusat gravitasi baru pada tata pemerintahan pasca Perang Dunia II, khususnya ketika AS mulai tergantung pada pasokan minyak dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan terhadap energi yang semakin besar. Minyak menjadi bagian penting untuk menjelaskan “perang lama” yang digambarkan melalui pengalaman dua perang dunia. Kebijakan energi AS dan UK berdasarkan pada pembentukan negara-negara “klien” atau

¹⁵⁵ Daniel Yergin, 1992, *The Prize : The Epic Quest for Oil, Money & Power*, Free Press, New York, hal. 343.

¹⁵⁶ Robert Goralski and Russel Freeburg, 1987, “Oil and War : How the Deadly Struggle for Fuel in WW II Meant Victory or Defeat”, Morrow, NY.

“penguasa lokal” di Timur Tengah untuk menjamin pasokan jangka panjang. Seperti yang terjadi di Iran melalui penguasaan atas pemimpin Iran Mohammed Mossadegh. AS juga mendukung penguasa yang disenangi, Reza Syah Pahlevi, yang berperan sebagai “klien” setia sampai menyalahgunakan sewa minyak yang menyebabkan dia dijatuhkan dalam Revolusi Islam pada tahun 1979.¹⁵⁷

Dinamika yang sama terjadi pada krisis Terusan Suez ketika Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser menasionalisasikan jalur air yang dilintasi dua-pertiga jalur minyak Eropa. Kali ini respons militer jauh lebih keras. Karena Terusan Suez dianggap sebagai rute transportasi minyak yang paling penting, maka Inggris dan Perancis bekerjasama dengan Israel melakukan serangan udara di Zona Terusan pada tahun 1956 sampai dipaksa mundur melalui embargo oleh Arab Saudi.¹⁵⁸ Konflik Suez dengan jelas menunjukkan minyak Timur Tengah merupakan “hadiah terbesar dunia”, sehingga keamanannya perlu dipertahankan dengan berbagai cara.

Embargo minyak negara-negara Arab setelah peristiwa Perang Yom Kippur tahun 1973 juga terkait dengan minyak dan perang. Ini menunjukkan sebuah era baru yang melihat minyak sebagai sumber daya yang strategis. Sebagai salah satu bentuk protes melawan kebijakan Barat terhadap Israel, negara-negara Arab mengurangi produksi, sehingga secara definitif mengaitkan perang Timur Tengah dengan kejutan melonjaknya harga minyak dunia. Konsumen panik, dan berupaya mencari sumber-sumber minyak baru. Dunia untuk pertama kalinya menyadari krisis energi yang sebelumnya sempat tertunda. Hal ini, bersama-sama dengan jatuhnya Shah Iran, menyebabkan rasionalitas atas Doktrin Carter, yang mengasumsikan bahwa AS, dan bukannya “kekuatan pendukung lokal”nya, yang memegang tanggung jawab utama untuk mempertahankan Teluk Persia “dengan segala cara yang diperlukan, termasuk kekuatan militer”. Hal ini juga khususnya mengarahkan militer AS untuk mencapai tujuan, dengan menempatkan minyak dibawah tanggung jawab Departemen Pertahanan dan lembaga-lembaga pemerintah lain yang bertanggung-jawab atas keamanan nasional dan menetapkan Satuan Tugas khusus “Rapid deployment Joint task Forces”

¹⁵⁷ Tedd Koppel, “Will Fight for Oil”, New York Times, 24 February 2006, lihat di : <http://www.globalpolicy.org/component/content/article/153/26260.html>, diakses tanggal 18 Maret 2010.

¹⁵⁸ Amanda Briney, “Suez Canal Connects the Red Sea with the Mediterranean Sea”, Geography, <http://geography.about.com/od/specificplacesofinterest/a/suezcanal.htm>, diakses tanggal 18 Maret 2010

yang dapat mengerahkan tentara AS ke kawasan dengan segera. Kebijakan ini dilanjutkan pada era Ronald Reagan dan George Bush.¹⁵⁹

Krisis minyak pertama setelah Perang Dingin terjadi pada tahun 1991, yaitu ketika pecah Perang Teluk. Situasi ini seolah mengembalikan konsep “perang minyak lama”, ketika Saddam Hussein melakukan invasi menjemputkan terhadap Kuwait.¹⁶⁰

Produksi minyak Irak dan Kuwait digabungkan mewakili 20 % produksi minyak negara-negara anggota OPEC dan pemilik 20% cadangan minyak dunia. Jika Saddam Hussein menguasai Kuwait, dia akan menjadi penguasa minyak dominan yang menentukan perekonomian global. Ketika sebanyak 4 juta barel minyak dengan tiba-tiba ditarik dari pasar dunia, maka terjadi meroketnya harga minyak dunia. Hal ini memaksa AS mengerahkan pasukannya (rencananya untuk sementara) untuk mempertahankan ladang minyak terdekat di Arab Saudi. Aksi tersebut diikuti dengan operasi militer “badai gurun” untuk menggiring Irak kembali ke wilayah perbatasan dan untuk membela Arab Saudi. Alasan tersebut menjustifikasi Presiden Bush yang mengatakan: “AS sekarang mengimpor hampir setengah dari minyak konsumsi minyak dalam negeri dan (Perang Teluk) menjadi ancaman terbesar independensi ekonomi”.¹⁶¹ Ketika tentara Saddam Hussein mundur, ladang minyak Kuwait dimusnahkan dan menyebabkan polusi minyak terbesar dalam sejarah dunia. Kehadiran tentara AS di Kuwait bertahan secara permanen di Kuwait dan Arab Saudi, dengan tujuan mempertahankan ladang-ladang minyak, menjaga zona larangan terbang diatas Iraq, dan menahan ambisi Saddam Hussain.

Kesimpulan

Perang dan konflik sangat erat terkait dengan masalah minyak dan sumber-sumber energi lainnya. Maka, minyak, sebagai energi vital pada era globalisasi, menjadi kekuatan yang dapat merusakkan perdamaian global dan kemakmuran yang didorong melalui globalisasi. Karena karakteristik fisiknya, minyak menjadi komoditas yang lebih mudah untuk dinasionalisasi oleh pemerintah yang merasa merugikan. Kepemilikan negara atas sumber-sumber

¹⁵⁹ Robert C. Sage, “The US Oil Policy in the Middle East”, Helium, US Politics, News and Issues, lihat di : <http://www.helium.com/knowledge/82355-the-us-oil-policy-in-the-middle-east>, diakses tanggal 18 Maret 2010.

¹⁶⁰ Persian Gulf War, Encyclopaedia Britannica, lihat di: <http://www.globalpolicy.org/component/content/article/153/26260.html>, diakses tanggal 18 Maret 2010.

¹⁶¹ Michael Klare. op.cit.

minyak meningkatkan potensi konflik. Maka untuk mengatasi konflik yang disebabkan oleh penguasaan minyak, berikut ini beberapa solusi:

1. Meningkatkan demokratisasi dalam pemerintahan, dengan cara melepaskan kepemilikan negara atas perusahaan-perusahaan minyak. Pemisahan ini membantu menghindarkan konflik akibat bercampurnya kepentingan bisnis perusahaan-perusahaan minyak dengan politik dan perang. Ketika permintaan terhadap minyak semakin meningkat, pemerintah akan meningkatkan pemakaian minyak sambil menindas aktivitas pro-demokrasi, penerapan pemerintah yang bersih dan mengarahkan pada ekonomi pasar.
2. Membantu mengurangi ketergantungan pada sumber-sumber energi berbahan fosil. Justru ini merupakan masalah yang sulit, memerlukan waktu yang lama, dan problematik.
3. Industri biominyak berbahan ethanol (masih dalam tahapan teknologi sederhana, tetapi kebutuhan terhadap biominyak ini sangat tinggi dalam skala global), justru menghancurkan dan menyebabkan masalah baru. Untuk mendapatkan biominyak, sumber-sumber makanan rakyat (mislanya jagung di Meksiko) dikorbankan untuk dijadikan energi. Risiko lainnya adalah menghancurkan keberadaan hutan hujan di Brazil untuk membuka lahan-lahan pertanian sebagai bahan dasar industri energi non-fosil.
4. Mengurangi pengaruh minyak terhadap dukungan, kejatuhan, dan meningkatnya konflik. Hal ini dapat dilakukan jika para pemangku kepentingan dalam bidang perminyakan, seperti pemerintah di negara-negara produsen dan konsumen, perusahaan minyak, organisasi internasional dan kelompok-kelompok masyarakat dapat memitigasi dan mencegah pertumpahan darah.

Daftar Referensi

- Bradshaw, Michael J, 1998, "Going Global: The Political Economy of Oil and Gas Development offshore of Sakhalin", *Cambridge Review of International Affairs*, Vol. 12, Issue 1, Summer.
- Cohen, Ariel, 2006, "Reducing U.S. Dependence on Middle Eastern Oil", *The Heritage Foundation*.
- Goralski, Robert, dan Russel Freeburg, 1987, "Oil and War : How the Deadly Struggle for Fuel in WW II Meant Victory or Defeat", Morrow, NY.
- Kaldor, Mary, Terry Lynn Karl, dan Yahia Said, 2007, "Oil Wars", Pluto Press, London.

- Kozloff, *Nikolas*, 2005, "Venezuela's Chavez: Oil is a Geopolitical Weapon", *Council for Hemispheric Analysis (COHA)*, Venezuela News, View and Analysis.
- Klare, Michael T, 2004, "Blood and Oil: The Dangers and Consequences of America's Growing Dependency on Imported Petroleum", McMillan, NY.
- Krueger, Anne, 1974, "The Political Economy of Rent Seeking Society", *American Economic Review*, Vol. 64, Juni 1974.
- Lendman, Stephen, 2007, "Wall Street Journal Claims Chavez Oil Policy Aims to Weaken US", Centre for Research on Globalization.
- Meyer, Lorenzo, 1977, *Mexico and the United States in the Oil Controversy, 1917-1942*, diterjemahkan oleh Muriel Vasconcellos, University of Texas Press, Austin.
- Schraeder, Peter J, 2000, "Cold War to Cold Peace: Explaining U.S.-French Competition in Francophone Africa", *Political Science Quarterly*, The Academy of Political Science, Vol. 115, No. 3 (Autumn).
- Tarzi, Shah M, 1991, "The Third World Governments and Multinational Corporations: Dynamics of Host's Bargaining Power", *International Relations*, Vol. X, No.3, Mei.
- Yergin, Daniel, 1992, "The Prize : The Epic Quest for Oil, Money & Power", Free Press, New York

Sumber Internet :

- Saudi Aramco*: <http://www.saudiaramco.com/irj/portal/anonymous?favlnk=%2FSaudiAramcoPublic%2Fdocs%2FAt+A+Glance%2FOur+Story&ln=en>, *NIOC*, <http://www.hoovers.com/company/National Iranian Oil Company/hhxjhi-1.html>,
- Qatar General Petroleum Company*: <http://www.fundinguniverse.com/company-histories/QATAR-GENERAL-PETROLEUM-CORPORATION-Company-History.html>,
- PDVSA*, <http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.en/designhome.tpl.html>,
- ADNOC*, <http://bharatbookbureau.blog.co.in/2010/01/20/abu-dhabi-national-oil-company-oil-gas-company-report-profile-covers-companys-exploration-blocksoil-and-gas-fields-refinery-lng-pipeline-storage>

assets-business-strategy-value-chain-swo/, Kuwait Petroleum Corporation, lihat di : <http://www.kpc.com.kw/default.aspx>, diakses tanggal 29 Januari 2010.

Nigerian National Oil Corporation (NNOC), www.nnpcgroup.com/

Libyan National Oil Corporation (NOC), <http://www.nockenya.co.ke/>

Sonatrach, <http://www.sonatrach-dz.com/>

<http://www.answers.com/topic/dick-cheney>,

Halliburton: <http://www.halliburton.com>,

Total Fina Elf: <http://www.fundinguniverse.com/company-histories/Total-Fina-Elf-SA-Company-History.html>,

Historiae: <http://www.historiae.org/statoil.asp>,

US Energy Information Administration, http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/PET_PRI_WCO_K_W.htm,

Council on Foreign Relations, www.cfr.org,

Royal DutchShell: <http://royaldutchshellplc.com/2008/05/>,

Lee S. Wolosky, Putin's Plutocrat Problem, 79 *Foreign Affairs* 18 (2000), <http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/fora79&div=28&id=&page=>

Anup Shah, 2004, "Crisis in Chechnya", *Global Crisis*, <http://www.globalissues.org/article/100/crisis-in-chechnya>, <http://bbs.cenet.org.cn/uploadimages/2004132356266152.pdf>,

Time Magazine, <http://www.time.com/time/covers/1101030331/>,

Jordan Lindell, 2009, "Clausewitz: War, Peace and Politics", <http://www.e-ir.info/?p=2735>,

Dietrich Eichholtz. *Krieg um Öl: Ein Erdölimperium als deutsches Kriegsziel 1938-1943*.

Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2006. Book review oleh Allison Frank, Harvard University, *Global Research* 2009, <http://35.9.18.4/reviews/showrev.php?id=23080>.

"Will Fight for Oil", *New York Times*, 24 February 2006,

<http://www.globalpolicy.org/component/content/article/153/26260.html>

Amanda Briney, "Suez Canal Connects the Red Sea with the Mediterranean Sea",

<http://geography.about.com/od/specificplacesofinterest/a/suezcanal.htm>,

Robert C. Sage, "The US Oil Policy in the Middle East", Helium, US Politics, News and

Issues: <http://www.helium.com/knowledge/82355-the-us-oil-policy-in-the-middle-east>.

Encyclopaedia Britannica, <http://www.globalpolicy.org/component/content/article/153/26260.html>,

Petrostrategies, http://www.petrostrategies.org/Links/Worlds_Largest_Oil_and_Gas_Companies_Sites.htm